

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dilihat dari Input, Proses, output pada Modul-modul SIPKD serta Indikator Efektivitas Sistem Informasi yakni Keamanan data, Waktu, Ketelitian, Variasi laporan atau *Output*, Relevansi termasuk dalam kategori Efektif dimana rata-rata jawaban responden untuk 5 Modul SIPKD adalah 81,6% dan rata-rata jawaban responden untuk indikator efektivitas sistem informasi adalah 82,1%.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah (1) Sumber Daya Manusia pada OPD yang belum memadai dari sisi kualitas (2) Jaringan internet yang sering mengalami gangguan, (3) Kurangnya pelatihan/bimbingan teknik dalam penerapan aplikasi SIPKD sehingga pemahaman para pegawai terhadap keuangan daerah belum di implementasikan sepenuhnya dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) Penggunaan aplikasi SIPKD masih sangat terbatas yakni hanya berpusat pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memberikan pelatihan terhadap semua yang terlibat dalam menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk lebih meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusianya dalam melakukan proses pengoperasian SIPKD seperti input, proses dan output khususnya pada bagian modul pelaksanaan dan penatausahaan serta modul akuntansi dan pelaporan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan penginputan data.
2. Meningkatkan atau menjaga kestabilan arus listrik untuk menghindari data yang belum tersimpan ketika terjadi aliran listrik serta menjaga agar jaringan internetnya tidak mengalami gangguan.
3. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada semua pegawai terkait aplikasi SIPKD kurang lebih 2 bulan sekali agar pemahaman mereka terkait SIPKD ini semakin baik dari sebelumnya terutama dalam input, proses dan output pada setiap modul-modul dalam SIPKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, Geoge H. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bagoe, Femi. 2013. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo, Jurusan Akuntansi. <http://kim.ung.ac.id/indeks.php/KIMFEB/article/download/2047/2026>.
Dilihat pada tanggal 21 Maret 2019.
- Books, TM. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Davis, Gordon.B. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Dewi, P.Ayu Ratna. 2013. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan, Jurusan Akuntansi.
Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019.
- Handoko. T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Jogiyanto. 2009. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kusufi dan Abdul Halim. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kwary, Deny Arnos. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamesah.D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Malayu Hasibuan.S.P.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyani, Sri. 2016. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Romney, Marshall. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Indeks.

Supriyono.R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFE

Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD

Surat Edaran Mendagri Nomor 900.806.BAKD, SE.900.360. BAKD tentang Implementasi SIPKD.

Sutabri, Tata. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, Jakarta.

Utami, Dian Arlupi. Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Gresik, Jurusan Akuntansi.
Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019.

Wasja. 2015. Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Instansi Pemerintah Daerah, Jurusan Akuntansi.
<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/download/2047/2026> Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019

www.djkd.kemendagri.go.id